

PENGELOLAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Ayi Nazmul Hidayat

Abstrak

Pelatihan ini bertujuan agar koordinator BK/konselor dapat mengelola program BK yang relevan dengan kondisi di SMA. Sasaran pelatihan adalah koordinator BK/konselor. Metoda yang digunakan ceramah, diskusi, dan demonstrasi/praktek. Temuan hasil pelatihan ini adalah adanya perubahan pada peserta, antara lain: (1) semangat dan mampu membuat program BK yang sesuai kebutuhan dan permasalahan siswa; (2) merasa cukup puas mengikuti pelatihan dan mengharapkan adanya pelatihan berikutnya; (3) mampu mengungkap kebutuhan dan permasalahan siswa; (4) memahami sistem pengelolaan program BK; dan (5) meningkatnya dorongan untuk mengembangkan keahliannya. Hasil akhir yang diperoleh pelatihan ini adalah berupa cara memperoleh karakteristik siswa, mengelola dan membuat program BK yang sesuai dengan karakteristik siswa sehingga dapat diperoleh program BK secara optimal. Untuk mengimplementasikan pengelolaan program BK tersebut direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) perlu melakukan penyesuaian dengan kondisi sekolah masing-masing; (2) perlu dipersiapkan kemampuan personil BK terutama dalam hal menganalisis kebutuhan dan permasalahan siswa, dan (3) menjadikan hasil analisis kebutuhan dan permasalahan siswa tersebut sebagai acuan untuk mengembangkan aspek-aspek pengelolaan program BK lainnya.

Kata kunci : pengelolaan program BK

Abstract

The training is intended to the coordinator of Guidance and Counselling (BK) for administering relevant programs in actual high school circumstances. The target training is the coordinator of Guidance and Counselling. The methods which are used such as lectures, discussions, and demonstrations/practice. The finding result of this training is the participants transformation, among others: (1) They have an enthusiasm and are capable of creating BK program suitable with the needs and students concern, (2) They feel quite satisfied to join the training and expect other trainings, (3) They capable to uncover the needs and student issues, (4) understand the BK program management system, and (5) Increasing motivation to working out their skills. The final results obtained is how to gain the characteristics of students, manage and create the programs that match the characteristics of BK students so that the BK program could be obtained optimally. Implementing BK management program is recommended and supposed to use these following matters: (1) Adjust to the conditions of their schools, (2) Preparation of BK personnel capabilities is needed, especially in terms of analyzing the needs and students' problem, and (3) Analyse the students needs and problems as references for intensifying other management aspects.

Keywords: BK program management

PENDAHULUAN

Terselenggaranya dan berhasilnya program layanan BK tidak mungkin terwujud tanpa adanya suatu sistem pengelolaan yang dilakukan secara baik, dalam arti dilakukan

secara jelas, sistematis dan terarah. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pengelolaan program BK merupakan bagian integral dan terpadu dari keseluruhan kegiatan BK di sekolah.

Pengakuan keberadaan bimbingan dan konseling dari pemerintah di Indonesia saat ini tertuang dalam Undang-Undang RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6 yang menyatakan: “Konselor adalah sebagai salah satu kualifikasi pendidik yang berpartisipasi menyelenggarakan pendidikan”. Demikian pula dalam berbagai dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan secara formal telah digariskan bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian terpadu dari pendidikan. Kemudian Kartadinata (2005: 105) mengemukakan bahwa “Kini sudah saatnya dilakukan penegasan ulang bahwa bimbingan dan konseling adalah bagian terpadu dari pendidikan, dan kini saatnya pula untuk meletakkan prinsip kebijaksanaan itu di dalam praktek”. Pendapat tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sciarra (2004:3) bahwa *“School counselors are an integral part of the education program as important to the school as teachers and administrators, and as essential to the main function of the school, academic success”*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Arthur Jones (1970:98-99) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam kaitannya dengan program BK mencakup enam kegiatan pokok, yaitu (1) planning, (2) organizing, (3) assembling, (4) directing, (5) supervising, dan (6) controlling. Atas dasar pendapat tersebut, sesuai dengan kebutuhan pelatihan ini, maka yang dimaksud dengan pengelolaan dibatasi pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, supervisi, dan evaluasi. Kelima jenis kegiatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan satu dengan lainnya dalam rangka mencapai tujuan program BK di sekolah.

Dalam merencanakan program semua personil sekolah harus dilibatkan sehingga semua pihak merasa sebagai bagian dari sistem BK yang akan dilaksanakan. Disamping itu juga dalam komponen perencanaan program harus dirumuskan secara eksplisit hal-hal yang menyangkut landasan penyusunan program, perencanaan program, tujuan program, fungsi dan prinsip-prinsip pelaksanaan program, analisis kebutuhan dan permasalahan siswa, isi layanan, jenis layanan, teknik, waktu dan tempat pelaksanaan BK, ruang lingkup program, jenis-jenis permasalahan yang akan ditangani, sarana dan prasarana yang digunakan, serta anggaran.

Dalam komponen pengorganisasian harus dirumuskan pula secara jelas struktur organisasi bimbingan, pembagian tugas, pengelompokkan kerja, dan mekanisme kerja bimbingan. Demikian pula dalam kegiatan pengarahan faktor koordinasi, faktor simulasi, kriteria, dan teknik pengarahan. Selain itu komponen supervisi pun merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan program. Penentuan jenis-jenis kegiatan yang akan dikontrol, kriteria supervisi, dan teknik supervisi. Demikian pula komponen evaluasi tidak dapat dilepaskan dari sistem pengelolaan program secara keseluruhan. Dalam komponen evaluasi ini perlu ditetapkan jenis-jenis kegiatan yang dievaluasi, kriteria evaluasi, evaluator, metoda, dan teknik evaluasi.

Semua komponen pengelolaan program di atas bukan hanya harus ada dalam suatu sistem pengelolaan program akan tetapi juga harus dilaksanakan seoptimal mungkin sehingga tujuan bimbingan dan konseling yang diharapkan dapat tercapai.

Di samping di atas, kurikulum Sekolah Menengah Atas (Petunjuk Teknik BK) menuntut bahwa pengelolaan layanan BK harus didukung oleh adanya organisasi, personil, pelaksana, sarana, prasarana. Ini berarti bahwa personil yang erat kaitannya dengan pelaksanaan BK di sekolah,

khususnya koordinator BK dan konselor perlu mengetahui, memahami, serta menyadari deskripsi tugasnya (*job description*) masing-masing, sehingga program BK dapat berfungsi secara optimal dan dapat memenuhi harapan semua pihak yaitu siswa, sekolah, dan kurikulum.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa program BK di SMA pada umumnya belum dapat memenuhi harapan serta belum sesuai dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sekalipun sudah ada organisasi, sarana, prasarana dan sistem pengelolaannya, namun ditemukan bahwa perencanaan programnya belum sesuai dengan kebutuhan siswa, kegiatan BK masih sebagai program yang bersifat *top down*, sehingga kadang-kadang kegiatan BK masih dirasakan sebagai sesuatu yang dipaksakan. Pengamatan lainnya menunjukkan bahwa konselor di sekolah belum semuanya memahami dan menyadari tugasnya masing-masing karena kurangnya kerja sama, wawasan, motivasi, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya meskipun pengarahan dan pengawasan sering dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Demikian pula evaluasi terhadap program yang diajukan untuk mengetahui tercapainya tujuan masih sangat jarang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan program BK belum ditangani secara optimal.

Terlepas dari kondisi-kondisi faktual di atas, di SMA sebenarnya sudah ada organisasi, sarana dan prasarana serta sistem pengelolaannya. Ini merupakan potensi atau faktor pendukung yang dimanfaatkan, tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana upaya mengoptimalkan pengelolaan program BK yang sesuai dengan kondisi sekolah sehingga dapat memenuhi harapan semua pihak.

Berangkat dari kesenjangan itu, maka koordinator BK/konselor perlu diberi pelatihan tentang pengelolaan program BK yang relevan dengan kebutuhan dan permasalahan siswa di sekolah. Pengelolaan

program BK yang dimaksud merupakan fokus dalam pelatihan ini. Pengelolaan program yang efektif dapat dirumuskan apabila karakteristik kebutuhan dan permasalahan siswa sudah diidentifikasi dengan seksama, sudah dikenali bagaimana sistem pengelolaan program BK di SMA, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak sesuai

Permasalahan di atas, secara tegas dinyatakan bahwa, pengelolaan program BK di SMA belum sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan siswa sedangkan program BK dapat berjalan dengan efisien dan efektif apabila program-programnya sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan siswa, serta pengelolaan programnya ditangani secara optimal.

Secara umum pelatihan ini bertujuan agar koordinator BK/konselor dapat meningkatkan pengelolaan program BK yang sesuai dengan kondisi di SMA, sedangkan tujuan khususnya agar mampu bagaimana cara :

1. memperoleh karakteristik siswa dalam kaitannya dengan program BK, yaitu memperoleh gambaran tentang program-program yang dibutuhkan siswa dan permasalahan yang berkaitan dengan program BK.
2. mengelola program BK, yaitu tentang bagaimana melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, supervisi, dan evaluasi program BK.
3. membuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, supervisi, dan evaluasi program BK yang sesuai dengan kondisi.

TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan pelatihan ini bertempat di SMA Negeri I Cisarua sedangkan peserta pelatihannya adalah koordinator BK/konselor SMA yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi, sejumlah 30 orang.

PENDEKATAN PROGRAM

Pendekatan yang digunakan dalam pelatihan ini, antara lain :

1. Pendekatan partisipatoris yaitu dalam melaksanakan pelatihan, fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelatihan. Mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan.
2. Pendekatan andragogi, yaitu dalam melaksanakan pelatihan fasilitator mengakui kemampuan, keunggulan dan pengalaman yang dimiliki para peserta pelatihan. Fasilitator banyak mengungkap kemampuan dan pengalaman peserta untuk dimanfaatkan dalam pelatihan ini, mengakui peserta pelatihan sebagai orang yang mampu dan berpengalaman dalam mengelola program BK, sehingga para peserta akan berpartisipasi dan berkontribusi.
3. Pendekatan komunikatif, memberi peluang kepada peserta pelatihan untuk dapat mengkomunikasikan kemampuan, keunggulan dan pengalaman yang dimilikinya dalam mengelola program BK.
4. Pendekatan kontekstual, kegiatan pelatihan ini disesuaikan dengan keadaan lingkungan sosial budaya para peserta pelatihan dan menghubungkannya dengan kebutuhan dan permasalahan yang di sekolah tempat tugas para peserta pelatihan.

METODE PELATIHAN

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah :

1. Metode diskusi, digunakan untuk mengungkap kemampuan, pengalaman, dan keunggulan para peserta pelatihan berkaitan dengan pengelolaan program BK.

2. Metode Ceramah, digunakan untuk menyampaikan materi berkaitan dengan bagaimana memperoleh karakteristik siswa, mengelola dan membuat program BK yang sesuai dengan kondisi.
3. Metode demonstrasi/praktek. Metode ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan, keunggulan, dan pengalaman peserta pelatihan berkaitan dengan mengelola program BK, misalnya bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi program BK yang pernah dilakukan oleh para peserta, selain itu bagaimana memperoleh data tentang karakteristik siswa yaitu kebutuhan dan permasalahan siswa, sebagai bahan untuk mengelola program BK.

LANGKAH-LANGKAH PELATIHAN

Langkah-langkah pelatihan dalam pengelolaan program BK, antara lain:

1. Melakukan konsolidasi di antaranya menentukan penanggung jawab program pelatihan dan lapangan, mengembangkan kemitraan dengan Diknas, MKKS dan MGPPBK Kabupaten Bandung Barat serta MGPPBK Kota Cimahi, melakukan rekrutmen pendamping serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
2. Melakukan persiapan, misalnya: menyiapkan ruangan untuk tempat pelatihan, rekrutmen calon pemberi materi pelatihan, rekrutmen calon peserta didik, dan memperbanyak materi yang akan disajikan untuk peserta pelatihan.
3. Melakukan pelatihan, kegiatan yang dilakukan antara lain mengungkap kemampuan, pengalaman, dan keunggulan peserta peserta berkaitan dengan pengelolaan program BK. Kemudian

menyampaikan materi tentang cara memperoleh karakteristik siswa, mengelola dan membuat program BK yang sesuai dengan kondisi sekolah. Selanjutnya mempraktekkan cara memperoleh karakteristik siswa, dan mengelola program BK yang sesuai dengan kondisi sekolah.

4. Secara bersama-sama fasilitator dengan peserta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan program BK dengan maksud untuk mengecek apakah sesuai pengelolaan program BK yang didiskusikan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan siswa, kemudian diperbaiki dan dibuat kesimpulannya.

HASIL PENELITIAN

Hasil pelatihan ini nampak sekali perubahannya pada peserta latihan, di antaranya meningkatnya semangat untuk membuat program BK yang sesuai dengan kondisi sekolah yaitu kebutuhan dan permasalahan siswa. Dilihat dari jumlah peserta yang berjumlah 30 orang koordinator BK/konselor. Tidak ada yang tidak hadir 1 orang pun selama pelatihan berlangsung, malahan koordinator BK/konselor yang lainnya ada yang mau ikut pelatihan untuk sesi berikutnya.

Dilihat dari pengembangan pengelolaan program BK di SMA, sesudah para peserta diberi pelatihan dan diakhiri dengan evaluasi. Kelihatan sekali kemampuan para peserta, antara lain : (1) mampu mengungkap kebutuhan dan permasalahan siswa yang berkaitan dengan pengelolaan program BK; (2) memahami sistem pengelolaan program BK; (3) mampu menyusun pengelolaan program BK yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan siswa; (4) peserta pelatihan terdorong untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keinginan untuk lebih meningkatkan keahliannya; (5) peserta pelatihan lebih terbuka untuk meningkatkan

kemampuan dalam bidang bimbingan dan konseling, terbukti sebagian besar peserta mengajukan kegiatan pelatihan berikutnya.

PEMBAHASAN

Dalam menelusuri kebutuhan dan permasalahan siswa melalui *problem checklist* dan wawancara dengan siswa sangat efektif dikembangkan. Terlebih lagi apabila menggunakan program dalam komputer. Namun untuk pelatihan ini dilakukan secara manual. Setiap para peserta melakukan analisis kebutuhan dan permasalahan siswa yang menjadi asuhan di tempat tugasnya. Para peserta menetapkan siswa yang mewakili sekolahnya sebanyak 30 orang untuk mengisi *problem checklist*, kemudian berkelompok dan menghitungnya semua siswa yang menjadi anggotanya, tiga orang yang mewakili kelompoknya menjumlahkan setiap pernyataan yang telah dipilih dan dijumlahkan pada masing-masing kelompoknya. Kemudian diurutkan, dan diambil dari urutan pertama sampai sepuluh, urutan tersebut menjadi permasalahan siswa, dan dijelajahi apa yang dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dari jawaban tersebut akan terlihat yang dibutuhkan oleh siswa. Penelusuran kebutuhan dan permasalahan siswa ini dapat dilakukan dan tidak banyak menggunakan waktu konselor, hanya perlu kerja sama dan banyak melibatkan siswa.

Pengelolaan program BK ini sangat efektif untuk dilaksanakan di SMA karena isi layanannya sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan siswa, dan diambil dari pendapat siswa, sehingga menarik perhatian siswa meskipun kegiatan bimbingan dan konseling itu nilainya tidak berupa angka dan tidak dimasukkan dalam rapor (buku kemajuan hasil belajar siswa). Dalam hal prosedur penyusunan program BK langkah-langkahnya disarankan sebagai berikut: (1) tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan penelaahan tentang tujuan, kebutuhan, serta

kemampuan dan kesiapan sekolah untuk melaksanakan kegiatan BK; (2) Tahap pertemuan yang dihadiri oleh petugas-petugas yang berminat dan memiliki kemampuan dalam BK. Dalam pertemuan tersebut didiskusikan tentang pentingnya dan kebutuhan sekolah terhadap layanan bimbingan yang terprogram; (3) pembentukan panitia sementara yang bertugas untuk menentukan dan merumuskan tujuan program bimbingan, mempersiapkan struktur organisasi bimbingan, dan membuat kerangka dasar program bimbingan; (4) kegiatan pembentukan panitia penyelenggara program (Rochman Natawidjaja, 1988:27).

Para peserta sebagian besar memiliki keinginan untuk dapat menyusun program BK yang diterima oleh siswa, dan personil sekolah. Namun mereka merasa bingung harus bagaimana menyusunnya. Dengan mengikuti pelatihan ini para peserta mendapatkan gambaran untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengelolaan program BK. Pengelolaan program dalam pelatihan ini dilandasi dari beberapa pendapat para ahli, di antaranya Stephen P. Robins (1976:15) mengemukakan bahwa pengelolaan berarti suatu proses dari fungsi-fungsi : perencanaan, pengorganisasian, memimpin, evaluasi, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik. David R Hampton (1979:1) mengemukakan, bahwa tugas manajer mencakup beberapa fungsi, yaitu *"planning & decision making, organizing, leading and directing, staffing, and controlling"*. Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pengelolaan pada dasarnya mencakup kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut pengelolaan program BK pun tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan itu.

Selama kegiatan pelatihan pengelolaan program BK berlangsung, sumbangan maupun perhatian dari para kepala sekolah sudah dirasakan oleh para peserta pelatihan, di antaranya dengan memberi izin konselor

untuk mengikuti pelatihan, menyediakan tempat, memberikan saran dan pendapat untuk terlaksananya pelatihan dengan baik. Keberadaan ini tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap manfaatnya pelatihan pengelolaan program BK.

Sunaryo Kartadinata (2005:109) mengemukakan bahwa dukungan kepala sekolah dalam implementasi dan penanganan program bimbingan dan konseling di sekolah sangat esensial, hubungan konselor dengan kepala sekolah dapat menentukan keefektifan program, dan pemahaman kepala sekolah yang baik terhadap profesi bimbingan dan konseling akan: (1) memberikan kepercayaan kepada konselor dan memelihara komunikasi yang teratur dalam berbagai bentuk; (2) memahami dan merumuskan peran konselor; (3) dan menempatkan staf sekolah sebagai tim atau mitra kerja. Selanjutnya menjelaskan bahwa apabila kepala sekolah memahami dengan baik profesi bimbingan dan konseling akan membebaskan konselor dari tugas yang tidak relevan, misalnya konselor sekolah yang diberi tugas mengajar bidang studi, bahkan mengurus hal-hal yang tidak relevan dengan bimbingan dan konseling, seperti jadi petugas piket, perpustakaan, koperasi, dan sebagainya. Tugas-tugas itu tidak relevan dengan latar belakang pendidikan, dan tidak akan menjadikan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara profesional.

Memiliki kemampuan mengelola program BK saja masih kurang apabila konselor tidak mampu melaksanakan program BK yang disusunnya dengan tepat. Pelatihan kelanjutan merupakan satu solusi untuk mengatasinya. Tapi inipun perlu kemampuan dan kesiapan untuk mengelola pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan BK. Alternatif lainnya yang diperkirakan lebih tepat adalah melakukan penelitian-penelitian yang hasilnya dapat diberikan kepada mereka melalui seminar, lokakarya, pendidikan dan latihan.

Untuk mengimplementasikan pengelolaan program BK yang telah disampaikan dan didiskusikan dalam pelatihan ini, perlu mempertimbangkan beberapa kondisi. Oleh karena itu diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Sebelum pengelolaan program BK ini diimplementasikan, terlebih dahulu perlu dipersiapkan; (a) kemampuan personil BK dalam melakukan analisis kebutuhan dan permasalahan siswa serta mengembangkan hasil analisis tersebut menjadi isi layanan, yang di dalamnya berisi layanan umum dan layanan intervensi, (b) kemampuan personil BK dalam mengembangkan materi isi layanan umum dan layanan intervensi kedalam aspek-aspek pengelolaan program BK.
2. Secara teknis persiapan mengimplementasikan pengelolaan program BK ini sebagai berikut:
 - a) perlu mendiskusikan program BK dengan personil BK antara lain dengan kepala sekolah, koordinator BK, konselor, guru mata pelajaran, dan wali kelas, sehingga mereka merasa memiliki dan terlibat dalam program tersebut,
 - b) mengadakan pertemuan ilmiah bersama personil BK, dengan maksud agar memahami, mendukung serta mempersiapkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan program BK,
 - c) menyampaikan perubahan-perubahan yang diusulkan dalam program tersebut kepada personil BK dan siswa,
 - d) melaksanakan penelaahan secara teliti terhadap pengelolaan program BK yang dilaksanakan di sekolah,
 - e) melakukan penelaahan kebutuhan dan permasalahan siswa di sekolah, dengan melakukan survei terhadap

siswa, dan personil BK. Survei ini maksudnya membantu koordinator BK mengenal kemampuan dan katagori pengelolaan program yang akan dimasukkan dalam pengelolaan program BK di SMA tersebut,

- f) mengembangkan pengelolaan program BK dengan cara mengenal kemampuan-kemampuan khusus konselor secara teratur, dan sangat diperlukan kerja sama dengan personil BK lainnya.

KESIMPULAN

Pelatihan pengelolaan program BK di SMA efektif untuk menangani program BK yang kurang didukung oleh personil sekolah dan siswa. Koordinator BK/konselor memiliki banyak kesempatan untuk melakukan pengelolaan program BK dengan lebih dulu melakukan analisis kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi siswa, kemudian melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan evaluasi. Dengan menganalisis kebutuhan dan permasalahan siswa maka program BK akan diterima oleh siswa dan didukung oleh personil sekolah lainnya karena program tersebut disusun, didiskusikan dan disepakati oleh personil sekolah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- David R Hampton. (1979). *Modern Management*. New York : Mc Graw-Hill Book Company.
- Jones, Arthur, J. (1970) *Principles of Guidance*. New York : Mc Graw Hill Book Company.
- Rochman Natawidjaja. (1988). *PeraIlnan Guru dalam Pendidikan di Sekolah*. Bandung: Abardan.

Sciarra, Daniel T. (2004). *Schools Counseling Foundations and Contemporary Issues*. Thomson: Hofstra University.

Sunaryo Kartadinata. (2005). *Arah dan Tantangan Bimbingan dan Konseling Profesional: Proposisi, Historik-Futuristik dalam Pendidikan dan Konseling di Era Global*. Bandung: Rizki.

Stephen Robbins P .(1988). *The Administrative Process*. New Delhi : Prentice _ Hall of India.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Jakarta: Depdiknas.

Dr.Ayi Nazmul Hidayat, M.Pd. Dosen Tetap
FKIP Uninus